



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI VI DPR RI
KE PT POS INDONESIA (PERSERO) DI BANDUNG JAWA BARAT
DALAM RANGKA PENGAWASAN KINERJA PERUSAHAAN
PADA MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2022-2023**

Tanggal 2 s.d. 4 Februari 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

REPUBLIC INDONESIA

2023



LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI VI DPR RI
KE PT POS INDONESIA (PERSERO) DI BANDUNG JAWA BARAT
DALAM RANGKA PENGAWASAN KINERJA PERUSAHAAN
PADA MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2022-2023

Tanggal 2 s.d. 4 Februari 2023

I. PENDAHULUAN

A. Dasar

Berdasarkan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan UU Nomor 42 Tahun 2014, dan kedua dengan UU Nomor 2 Tahun 2018 dan ketiga dengan UU Nomor 13 Tahun 2019 dan Pasal 60 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib mengatur bahwa Komisi dalam melaksanakan tugas di bidang pengawasan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat, antara lain dapat mengadakan kunjungan kerja spesifik dalam masa sidang, yang hasilnya dilaporkan dalam rapat komisi untuk ditindaklanjuti.

Mengacu pada undang-undang tersebut, maka kunjungan kerja ini juga dilaksanakan atas Keputusan Pimpinan DPR RI tentang Penugasan Anggota Komisi I sd komisi XI DPR RI untuk melakukan Kunjungan Kerja dan Keputusan Rapat Intern Komisi VI DPR RI.

B. Obyek Kunjungan Kerja

Objek kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI adalah PT Pos Indonesia (Persero) di Bandung serta menghadirkan Pejabat BUMN setingkat eslon satu Kementrian Badan Usaha Milik Negara (KBUMN) RI.

C. Maksud dan Tujuan

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ini dimaksudkan untuk melaksanakan fungsi Dewan dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan kebijakan maupun program pemerintah, khususnya yang terkait dengan bidang tugas Komisi VI DPR RI yakni Perdagangan, Investasi, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, BUMN dan Persaingan Usaha.

Kunjungan kerja Spesifik Komisi VI DPR RI juga bertujuan untuk mendapatkan penjelasan dari Dirut PT Pos Indonesia (Persero) terkait perkembangan Kinerja Korporasi terutama di Jawa Barat.

Secara khusus kunjungan Spesifik Komisi VI DPR RI ini adalah untuk memperoleh gambaran terkait pengawasan terhadap kinerja PT Pos Indonesia (Persero) di Provinsi Jawa Barat dan peranannya dalam penyaluran BLT (Bantuan Langsung Tunai), Bantuan Sembako, bantuan PKH (Program Keluarga Harapan), Bantuan Subsidi Upah (Kementerian Tenaga Kerja) dan pengiriman dokumen, kurir maupun produk-produk UMKM di seluruh Indonesia dan negara-negara lain di dunia serta mendorong pemulihan ekonomi di Provinsi Jawa Barat.

Seperti yang kita ketahui PT Pos Indonesia (Persero) adalah sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia yang bergerak di bidang layanan pos. Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1995, ada pengalihan bentuk perusahaan yaitu Perusahaan Umum (Perum) menjadi sebuah perusahaan perseroan. PT Pos Indonesia didirikan pada Tahun 1746, kini selain melayani jasa pos dan kurir, juga bergerak di bidang jasa keuangan, ritel, dan properti, yang meliputi jaringan lebih dari 4.000 kantor pos dan 28.000 Agen Pos yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu PT Pos Indonesia juga memberikan pelayanan pembayaran tagihan listrik, air dan telepon bisa dinikmati di kantor-kantor Pos Indonesia termasuk melayani pelanggan internasional untuk transfer uang, paket pos barang berharga dan lain lain dengan cara ekspansi wilayah pelayanan dengan menjalin kerja sama dengan badan-badan usaha di negara lain yang berskala internasional, seperti Western Union.

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI juga dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran dan penjelasan yang berhubungan dengan perkembangan kinerja Pemerintah Daerah dan BUMN koordinasi dan sinergisitas dengan kementerian BUMN, serta permasalahan dan kendala yang dihadapi sekaligus upaya penyelesaiannya termasuk terkait dengan peran BUMN dalam penanganan dampak pandemic covid-19 dan ancaman resesi terutama di lingkungan Provinsi Jawa Barat.

D. Waktu dan Acara Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI

Pada Hari Kamis 2 Februari 2022 pukul 11.00, Tim Komisi VI melakukan pertemuan dengan Bapak Amrizal, Subkoordinator/Penata Kelola Perusahaan Negara Muda pada Keasdepan Jasa Logistik, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Bapak Faizal Rochmad Djoemadi, Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) Beserta Jajaran Direksi.

Hasil dari kunjungan kerja spesifik ini akan menjadi masukan bagi Komisi VI DPR RI untuk memberikan rekomendasi bagi pemerintah terkait dengan pengawasan BUMN sebagai korporasi yang dimiliki Negara dan arah kebijakan pemerintah terkait perkembangan BUMN sebagai salah satu sumber pendapatan negara.

E. Susunan Anggota Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Provinsi Bali

Susunan Anggota Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI sesuai dengan Surat Tugas DPR RI Tanggal 2-4 Februari 2023 adalah sebagai berikut:

NO	NO. ANGGOTA	N A M A	KETERANGAN
1.	A-352	MARTIN MANURUNG, S.E., M.A	PIMP./F.NASDEM
2.	A-196	ADISATRYA SURYO SULISTO	F. PDIP
3.	A-170	RIEKE DIAH PITALOKA	F. PDIP
4.	A-348	TRIFENA M. TNAL, B.Sc.	F. PG
5.	A-302	NUSRON WAHID	F. PG
6.	A-94	MUHAMMAD HUSEIN FADLULLOH, B.Bus., M.M., MBA.	F. GERINDRA
7.	A-135	HENDRIK LEWERISSA, S.H., LL.M	F. GERINDRA
8.	A-96	MULAN JAMEELA	F.GEINDRA
9.	A-11	TOMMY KURNIAWAN	F.PKB
10.	A-16	Drs. H. ACEP ADANG RUHIAT, M.Si.	F. PKB
11.	A-20	LULUK NUR HAMIDAH, M.Si.,M.P.A.	F.PKB
12.	A-563	PUTU SUPADMA RUDANA	F. PD
13.	A-447	AMIN AK, MM.	F. PKS
14.	A-485	H. JON ERIZAL, S.E., M.B.A	F. PAN
15.	A-499	Hj. INTAN FAUZI, S.H., LL.M.	F. PAN

II. TEMUAN LAPANGAN

Hasil Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI di Bandung, Provinsi Bali ke PT Pos Indonesia (Persero) adalah sebagai berikut :

I. HASIL KUNJUNGAN KERJA RESES KOMISI VI DPR RI KE BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT DENGAN AGENDA SEBAGAI BERIKUT:

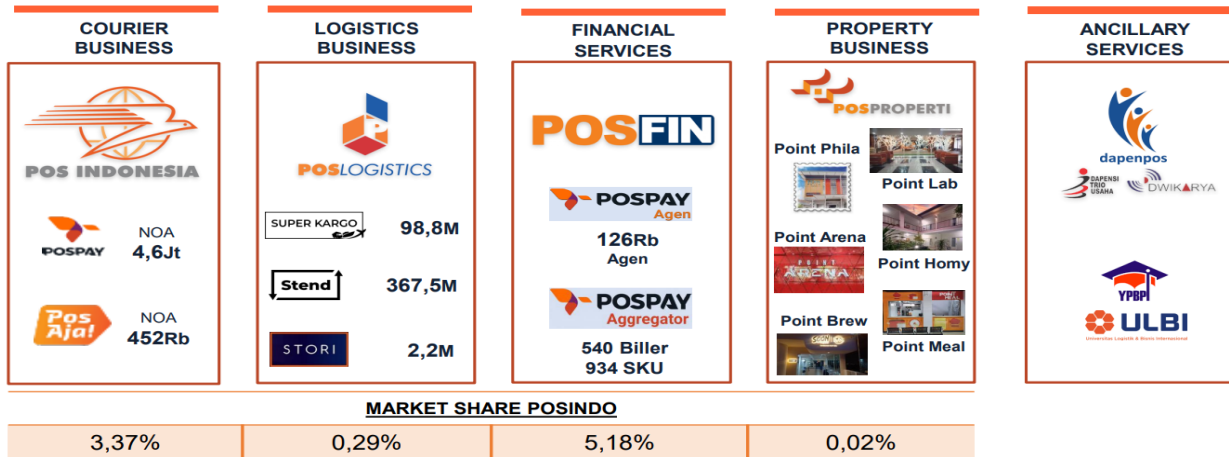


Team Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI Provinsi Jawa Barat, Bandung, 2 Februari 2023 dengan Bapak Amrizal, Subkoordinator/Penata Kelola Perusahaan Negara Muda pada Keasdepan Jasa Logistik, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Bapak Faizal Rochmad Djoemadi, Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) Beserta Jajaran direksi di pimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Bapak **Martin Manurung, SE., M.A.**

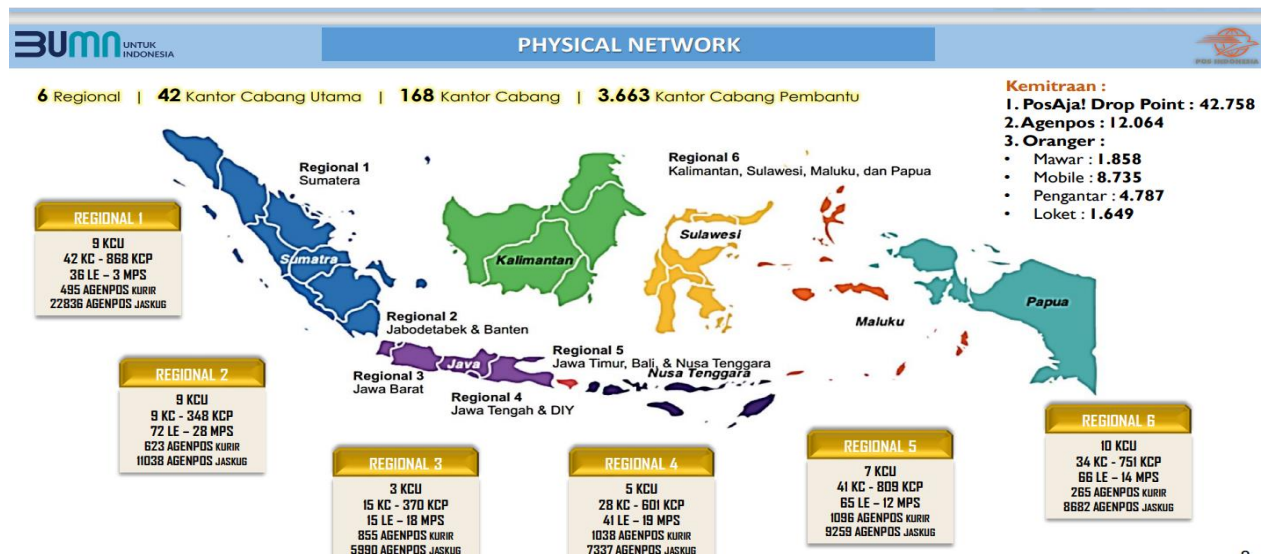
Temuan Lapangan sebagai berikut :

PT Pos Indonesia (Persero)

PT Pos Indonesia (Persero) memiliki 4 Business Portfolio yaitu Kurir dengan Market Share korporasi sebesar 3,37%, Logistik 0,29%, Jasa Keuangan 5,18% dan Properti 0,02% dan dilengkapi dengan Ancillary Service (Universitas Logistik Bisnis Internasional/ULBI, Dapensi Trio Usaha/DTU dan Dapensi Dwi Karya/DDK).



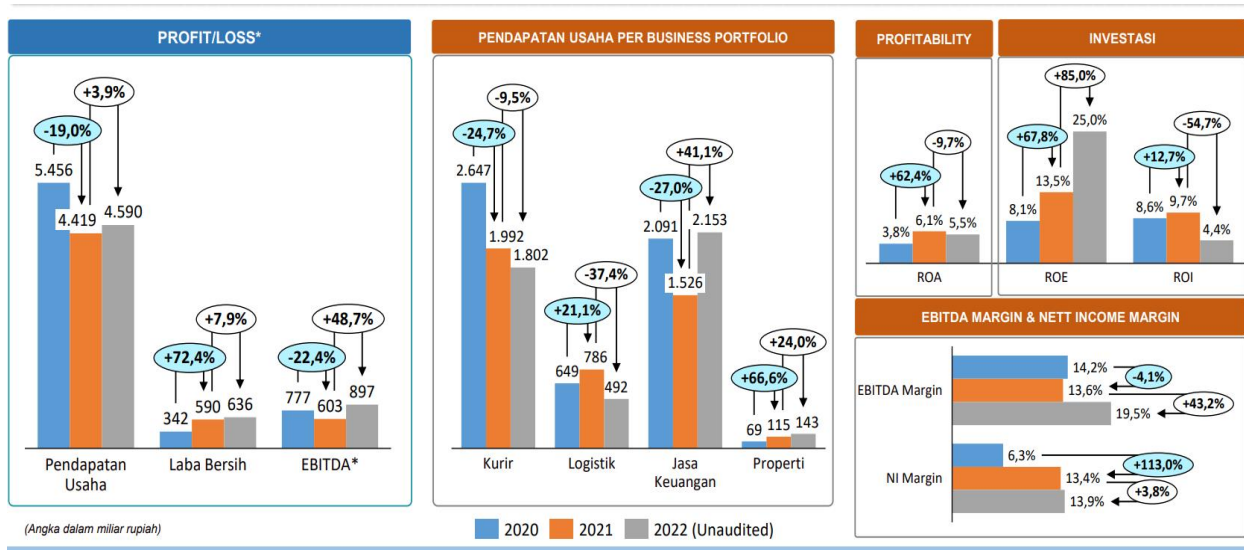
1. Regional 1 Medan (meliputi Provinsi Aceh, Sumatra Utara, Riau, Kepulauan Riau, Sumatra Barat, Bengkulu, Jambi, Lampung, Sumatra Selatan dan Bangka Belitung).
2. Regional 2 Jakarta (meliputi Provinsi DKI Jakarta, Debotabek dan Banten)
3. Regional 3 Bandung (meliputi Provinsi Jawa Barat kecuali Debotabek)
4. Regional 4 Semarang (meliputi Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta)
5. Regional 5 Surabaya (meliputi sebagian Provinsi Jawa Timur, Bali, NTB dan NTT)
6. Regional 6 Makassar (meliputi Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan dan Papua).



Kinerja korporasi pada Tahun 2022 yaitu

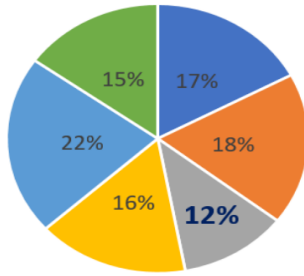
1. Pendapatan Usaha tumbuh 4%, Laba Bersih Tumbuh 8% dan EBTIDA tumbuh 49%.

2. Portopolio bisnis kurir turun 10%, bisnis logistic turun 37% dan Bisnis Jasa Keuangan tumbuh 41%, serta bisnis Properti tumbuh 24%
3. ROA turun 10% dan ROE naik 25%, ROI turun 55%
4. EBTIDA Margin naik 43% dan Nett Income Margin naik 4%.



Kontribusi PT Pos Indonesia (Persero) sesuai pembagian regional menunjukkan rating dalam pembentukan laba yaitu Regional 4 sebesar 37%, Regional 5 sebesar 30%, Regional 3 (meliputi Provinsi Jawa Barat kecuali Debotabek tapi termasuk Bandung) sebesar 20%, Regional 1 sebesar 17% Regional 6 sebesar 7% dan Regional 2 rugi sebesar 12%. Karena itu perlu adanya evaluasi terkait kinerja Regional 2 (meliputi Provinsi DKI Jakarta, Debotabek dan Banten) yang tidak mampu mencetak Laba justru rugi sebesar minus 12%

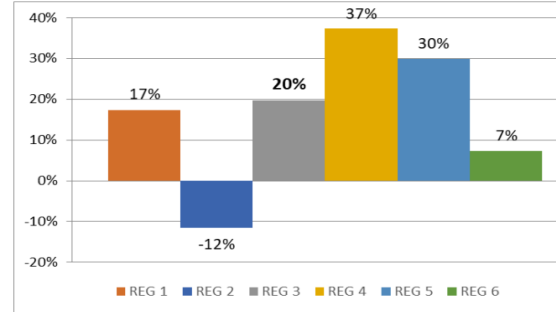
KONTRIBUSI REVENUE



■ REG 1 ■ REG 2 ■ REG 3 ■ REG 4 ■ REG 5 ■ REG 6

	REV 2022	Cont. %
REG 1	820	17%
REG 2	871	18%
REG 3	554	12%
REG 4	775	16%
REG 5	1.027	22%
REG 6	722	15%
Total	4.769	

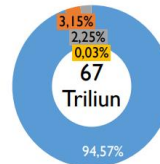
KONTRIBUSI LABA (EBT)



	EBT 2022	Cont. %
REG 1	113	17%
REG 2	-75	-12%
REG 3	128	20%
REG 4	244	37%
REG 5	194	30%
REG 6	48	7%
Total	652	

Penyaluran bantuan social dari Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, dan lain meliputi 67 Triliun Rupiah pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Jenis Bantuan Sosial	Jumlah Penerima	Jangka Waktu Penyaluran
Sembako Triwulan I	18,8 juta KPM	Jan-Mar
Sembako Triwulan II + BLT Minyak Goreng	17,6 juta KPM	Apr-Jun
Sembako Mei + BLT Minyak Goreng	1,1 juta KPM	Mei
Sembako Triwulan III (83 Kab/Kota)	1,1 juta KPM	Jul-Sep
BLT BBM + Sembako Sept	20,65 juta KPM	Sep-Okt
BLT BBM Tahap II	20,65 juta KPM	Nov-Des
Sembako Triwulan IV	18,6 juta KPM	Okt-Des
Program Keluarga Harapan	9,9 juta KPM	Okt-Des
Bantuan Subsidi Upah (Kemenaker)	3,5 juta penerima	Nov-Des
Bantuan Dana Kewirausahaan (Yayasan KBUMN)	80.000 penerima	Des-Jan 23
Bansos 63 Pemda	750.000 penerima	Mei-Des



■ Kemensos
■ Kemenaker
■ Pemda
■ Yayasan KBUMN

Model Penyaluran Bansos secara Langsung pada KPM



Antaran langsung dilakukan bagi KPM Lansia, difabel, atau sakit ($\pm 10\%$ dari data berhasil salur)

Tantangan Penyaluran Bansos Wilayah 3T (Kec. Siding, Kab Bengkayang-Kalbar)



Sedangkan dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) korporasi terdiri dari bidang Pendidikan, bidang Lingkungan Hidup dan bidang Pengembangan UMKM meliputi dana sebesar 21,4 Miliar Rupiah dengan penambahan 90 Mitra Binaan adalah sebagai berikut:

Arahan Menteri BUMN :
Target Penyaluran CSR & TJSL untuk Bidang Pendidikan, Bidang Lingkungan Hidup, dan Bidang Pengembangan UMKM


Dana
Tersalurkan
21,4 M
(growth -18%)


Penambahan 90
Mitra Binaan
(growth -37%)



PROGRAM PENDIDIKAN



BANTUAN UNTUK GEREJA



BANTUAN UNTUK MASJID



PROGRAM BANTUAN BENCANA



MENANAM 27.600 POHON



BANTUAN UMKM

Kontribusi PT Pos Indonesia (Persero) untuk Jawa Barat meliputi bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Pembangunan Infrastruktur termasuk Pembangunan Pos Co Bandung untuk Komunitas dan UMKM sebagai berikut:



KONTRIBUSI PT POS UTK JAWA BARAT



PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT



EKSPOR KAYU DARI MAJALENGKA



PENGIRIMAN KARYA SENI KE IKN



**KEMITRAAN POS DENGAN
UMKM KOTA CIMAHI**



**KERJA SAMA DENGAN ASOSIASI
PENGUSAHA INDONESIA JABAR**

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR












**PENGEMBANGAN POS CO BANDUNG UNTUK
KOMUNITAS DAN UMKM**

21

Roadmap PT Pos Indonesia sesuai Klaster Jasa Logistik yaitu menjadi perusahaan logistic terkemuka di Indonesia yang menyediakan layanan handal dan kompetitif melalui integrasi antar moda efisien, pemanfaatan infrastruktur dan sinergi antar BUMN dengan tahapan sebagai berikut:

1. Survival & Kelangsungan Hidup (2020-2021)
2. Restrukturisasi & Alignment (2022-2024)
3. Tranformasi & Inovasi

KUNCI ROADMAP BUMN 2020-2024 DALAM APS 2023

5 FORMULASI PRIORITAS
KEMENTERIAN BUMN 2020-2024

VISI DAN MISI ROADMAP BUMN 2020-2024
KLASTER JASA LOGISTIK

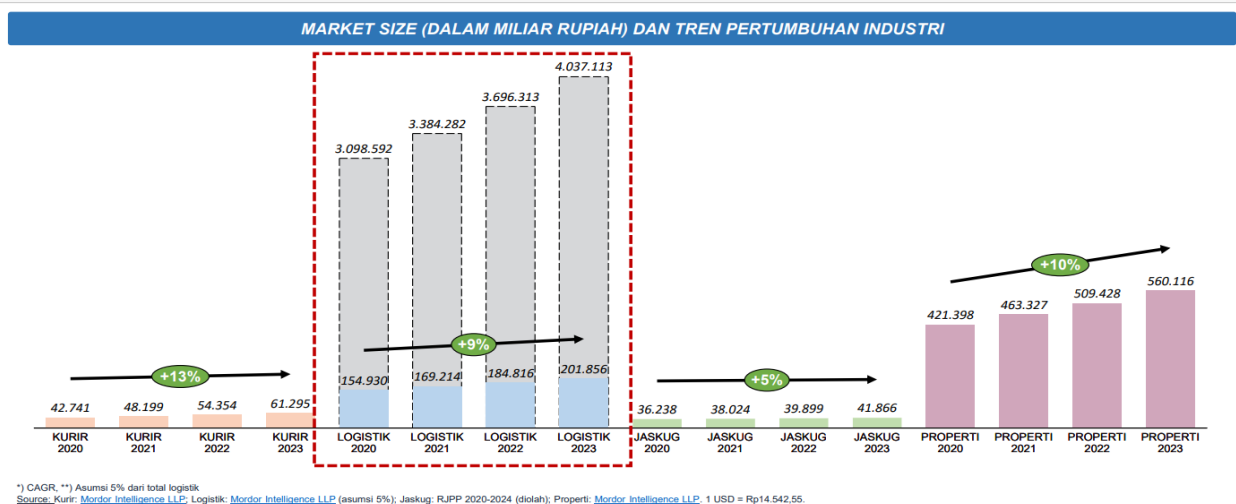
Visi dan Misi Kementerian BUMN untuk BUMN Klaster Jasa Logistik:

“Menjadi perusahaan logistik terkemuka di Indonesia yang menyediakan layanan handal dan kompetitif melalui integrasi antar moda yang efisien, pemanfaatan infrastruktur, dan sinergi antar BUMN.”

GARIS BESAR PENTAHAPAN
ROADMAP BUMN 2020-2024

- I 2020-2021
SURVIVAL & KELANGSUNGAN HIDUP
- II 2021-2022
RESTRUKTURISASI & ALIGNMENT
- III **2022-2024**
TRANSFORMASI & INOVASI








PT Pos Indonesia (Persero) berada pada Ekosistem bisnis yang menarik karena industry kurir, logistic dan property tumbuh di atas Pertumbuhan ekonomi nasional (5,3%), sedangkan industry jasa keuangan berbasis fee masih tumbuh di bawa pertumbuhan ekonomi nasional, namun dengan trasformasi dan inovasi korporasi tentunya memiliki potensi bisnis yang baik juga.



Karena itu PT Pos Indonesia (Persero) memiliki potensi bisnis di bidang logistic yang sangat bagus sebagai perusahaan logistic terkemuka jika melakukan kolaborasi antar BUMN terkait sebagai berikut:

Pos Indonesia to become a SOE Logistics Company						
Industry	Capabilities	End-to-End Logistics				
		Freight Forwarding	Warehousing	Loading-Unloading	Transportation (In-land)	Value Added Service
Mining						
Industrial & Construction						
Agriculture, Forestry, Fishery						
FMCG						
Health						
Oil & Gas						
Others						

Karenanya untuk dapat mewujudkan PT Pos Indonesia (Persero) sebagai korporasi logistic terkemuka, maka dibutuhkan dukungan politik terkait regulasi dan pelibatan PT Pos Indonesia dalam program strategis nasional di bidang logistic yaitu sebagai berikut;

DUKUNGAN REGULASI	DUKUNGAN PROGRAM STRATEGIS
 <p>Mendorong perubahan Perpres 63/2017 agar POS termasuk sbg penyalur dalam penyaluran bantuan sosial secara non tunai</p>	 <p>Proyek Logistik IKN dan Pemilu Serentak 2024</p>
 <p>Perpres untuk Konsep Implementasi End-to-End Logistik Bappenas</p>	 <p>Seluruh kiriman kurir & logistic Pemerintah/K/L/Pemda & Militer dikerjakan oleh POS</p>
 <p>Mendorong POS sebagai Champion Logistic dan Konsolidator Perusahaan Logistic BUMN & Anak Perusahaan BUMN bidang logistic</p>	 <p>Pos menjadi Bagian dalam Supply Chain LKPP</p>
	 <p>Kerja Sama Penyaluran Bantuan Sosial</p>

III. REKOMENDASI

1. Komisi VI DPR RI menerima paparan dan penjelasan dari Bapak Amrizal, Subkoordinator/Penata Kelola Perusahaan Negara Muda pada Keasdepan Jasa Logistik, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Bapak Faizal Rochmad Djoemadi dan Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero).
2. Komisi VI DPR RI mengapresiasi Kinerja PT Pos Indonesia (Persero), walaupun menghadapi tantangan yang berat terkait fungsi perusahaan tergerus kemajuan teknologi internet dan Handpone Email, dan perusahaan pesaing seperti starup, Tokopedia dll termasuk Tiki, J&T Express, JNE, namun masih bisa bertahan dan mencetak Laba pada Tahun 2022 sebesar Rp.636 Miliar.

3. Komisi VI DPR RI mengapresiasi kinerja PT Pos Indonesia (Persero) Regional 3 (meliputi Provinsi Jawa Barat kecuali Debotabek) pada Tahun 2022 menunjukkan perkembangan positif terkait Pendapatan sebesar Rp.554 Miliar dan Laba sebesar Rp.128 Miliar.
4. Komisi VI DPR RI mendukung PT Pos Indonesia sebagai pemimpin holding BUMN Logistic atau BUMN Logistic karena Indonesia belum punya BUMN Logistik, selama ini bidang logistik dilakukan anak perusahaan beberapa BUMN.
5. Komisi VI DPR RI mendorong PT Pos Indonesia (Persero) melakukan percepatan transformasi teknologi dan inovasi agar dapat meningkatkan Market share korporasi dan bisa meningkatkan daya saing dengan perusahaan swasta sejenis seperti Tokopedia Tokopedia dll termasuk Tiki, J&T Express, JNE.
6. Komisi VI DPR RI mendukung PT Pos Indonesia (Persero) mendapatkan penugasan terkait seluruh kiriman kurir & Logistik Pemerintah/K/L/Pemda dan Militer di seluruh wilayah Indonesia termasuk pengiriman logistic Pemilu melalui penerbitan Perpres
7. Komisi VI DPR RI mendorong perubahan Perpres 63/2017 agar PT Pos Indonesia (Persero) dilibatkan dalam penyaluran bantuan secara non tunai.
8. Komisi VI DPR RI mendorong PT Pos Indonesia (Persero) menjajaki dalam bidang penyimpanan deposit barang oleh pelanggan dengan system code juga yang selama ini belum diterapkan di negara manapun.
9. Komisi VI DPR RI mendorong PT Pos Indonesia (Persero) mensosialisasi gerakan surat menyurat dengan system pranko Pos sesuai dengan produk Pos terbaru cetak pranko sesuai gambar/foto pesanan pelanggan.
10. Komisi VI DPR RI mendorong PT Pos Indonesia membuat museum Pos sebagai sarana edukasi pada masyarakat terutama pelajar
11. Komisi VI DPR RI mendorong PT Pos Indonesia (Persero) melaksanakan kewajiban terhadap hak-hak pekerja yang belum dilaksanakan dan menghindari melakukan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) baru.

IV. PENUTUP

Demikianlah laporan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Provinsi Jawa Barat diharapkan menjadi bahan masukan bagi Komisi VI DPR RI dalam rangka mengawasi kinerja BUMN serta rekomendasi bagi pemerintah, terkait dengan pengawasan program dan kebijakan pemerintah.

Jakarta, 10 Februari 2023

Ketua Tim Kunker Spesifik Komisi VI DPR RI

Provinsi Jawa Barat

TTD

Martin Manurung, SE., M.A.

A352

Lampiran Dokumen :



Team Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI Jawa Barat yang dipimpin oleh Bapak Martin Manurung, Bandung, 2 Februari 2023



Team Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI Jawa Barat yang dipimpin oleh Bapak Martin Manurung, Bandung 2 Februari 2023

